

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisasmita, & Raharjo. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Adrian Sutedi. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Boediono. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Diadit Media. 2011.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pelajar Pustaka. 2010.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi. 2023.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Unram Press. 2020.
- R. Santoso Brotodiharjo. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama. 2013
- Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, cetakan pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta, 2005, hlm.; 12.
- Saragih, & Juli Panglima. *Desentralisasi Fiskal dan keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2022.
- Siahaan Marihot P. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Siahaan Marihot P, *Kompilasi Peraturan di Bidang BPHTB*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2011
- Tunggul Anshari, *Ilmu Hukum Pajak*, Setara Press, Malang, 2007, hlm.47-48
- Wahyu Purhantara. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Vol. 1). Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 153).

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 Nomor 15 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat: 14/280/2023), (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 125).

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 61 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

C. Jurnal

Ayaturrohman Fijihadi, "Tantangan dan Kontroversi terhadap Dampak Serta Implikasi dalam Implementasi PP No. 35 Tahun 2023", Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora, Vol 3, No.1 Maret 2024, hlm. 238.

Bahrudin, *Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Jual Beli Tanah*, Vol 5, Jurnal Universitas Bandar Lampung, 2014, hlm 4.

Fred B.G Tumbuan, *Beberapa Catatan Mengenai Pembuktian Akta Otentik*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 6, No. 2, 1976, hlm 123.

Riskha Indah Respati, dkk, “Asas *certainty* dalam mekanisme pembayaran kewajiban bea perolehan hak atas tanah dan bangunan”, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol 11, No. 03, Desember 2020, hlm. 324.

D. Internet

Akses Pencarian Penulisan Karya Ilmiah di Universitas Gadjah Mada
<http://etd.repository.ugm.ac.id>.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum JDIH BPK RI, Pencarian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,
<https://peraturan.bpk.go.id/>.

E. Skripsi, Tesis, dan/atau Desertasi

Rindi Prima, “Restitusi Pajak Sebagai Pengejawantahan Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak Penghasilan Terkait Pembatalan PPJB di Kota Yogyakarta”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019.

Rizky Rabbani Mufti, “Penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan di Kota Bengkulu Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2024.